



SALINAN

**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 121 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementasi serta terukur pada setiap triwulannya, melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/1254/XI/Sosbud-Pem/Bappeda-2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pegasusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pegasusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
 5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pegasusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 123) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Januari 2019
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

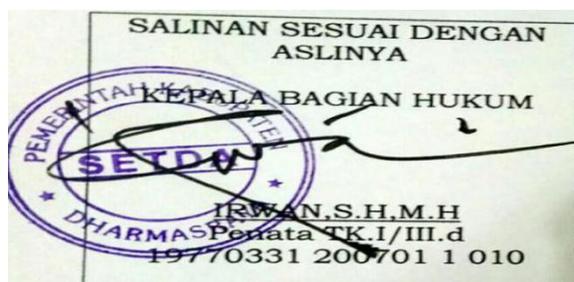
diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 2



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG : Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarus-utamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Seluruh Perangkat Daerah	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah	Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten	B03 :		B03 :
					1. Permintaan Nama Tim/ Personel Anggota Pokja PUG kepada Perangkat Daerah		1. Scan surat permintaan nama Tim/Personel Anggota Pokja PUG kepada Perangkat Daerah
					2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten		2. Scan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten
					B06: -		B06: -
B09: -	B09: -						
B12: -	B12: -						
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Seluruh Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah	Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah	B03:		B03:
					Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di masing-masing Perangkat Daerah		Scan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di masing-masing Perangkat Daerah
					B06: -		B06: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten yang ditandatangani oleh minimal Ketua Pokja PUG
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Seluruh Perangkat Daerah	Perangkat Daerah memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh Perangkat Daerah dan Nagari 2. Tersusunnya Laporan kerja tahunan Pokja PUG Kabupaten	B03: 1. Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG 2. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota <i>Focal Point</i>		B03: 1. Scan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi 2. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B06: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Kecamatan dan Nagari		B06: Scan bukti sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					B09: Penyusunan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Kabupaten		B09: Scan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Kabupaten terkait dengan pelaksanaan sosialisasi
					B12: -		B12: -
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan di Daerah							
Pembentukan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten	Meningkatnya kapasitas Ti Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG dari Perangkat Daerah 2. Penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten 3. Ditetapkannya Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten dengan Keputusan Bupati 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra)		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG dari Perangkat Daerah 2. Scan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten 4. Scan bukti sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten		5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/ Driver PPRG Kabupaten antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Publikasi Profil Gender Kabupaten setiap tahunnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Dinas Kominfo, Bagian Humas	Tersedianya data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten pada website daerah	B03: 1. Publikasi Profil Gender Tahun sebelumnya (2018) pada website Pemerintah Daerah 2. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten tahun 2019		B03: 1. Scan link Profil Gender Tahun sebelumnya (2018) pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten tahun 2019
					B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten tahun 2019		B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten tahun 2019		B09: 1. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten 2019 (lengkap) 2. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak tahun 2019 (tampak depan/cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten dalam website pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten Tahun 2019 pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kabupaten pada website pemerintah daerah	B03: Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah		B03: Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B06: 1. Penelaahan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) oleh Tim Penggerak PPRG Kabupaten terhadap Rencana Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 2. Penyusunan <i>Gender Budget Statement</i> pada rancangan RKA Tahun 2020		B06: 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak PPRG (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak PPRG) 2. Scan Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah) dan dilampirkan dengan RKA

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					<p>3. Publikasi <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) pada RKA SKPD pada website pemerintah daerah</p> <p>4. Tersedianya menu tagging/penandaan kegiatan yang responsif gender pada e-planning</p>		<p>3. Scan link <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah</p> <p>4. Print screen menu tagging kegiatan yang responsif gender pada e-planning</p>
					<p>B09:</p> <p>1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten Tahun 2020 yang ditetapkan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah</p> <p>2. Terinventarisasinya kegiatan Perangkat Daerah yang Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada menu e-planning</p>		<p>B09:</p> <p>1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah dengan lampiran GBS</p> <p>2. Rekapitulasi kegiatan perangkat daerah berdasarkan hasil tagging pada e-planning (yang terdiri dari nama program, indikator kinerja program, nama kegiatan, output kegiatan, jumlah pagu)</p>
					<p>B12:</p> <p>1. Dilampirkannya GAP dan GBS yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2020</p>		<p>B12:</p> <p>1. Scan dokumen GAP dan GBS yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2020</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					2. Tersedianya menu tagging/penandaan kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya kegiatan Perangkat Daerah yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG		2. Print screen menu tagging kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Rekapitulasi kegiatan perangkat daerah yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting (yang terdiri dari nama program, Indikator Kinerja Program, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu) 4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pemantauan pelaksanaan PUG	Badan Perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati melalui Wakil Bupati	B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah triwulan I		B03: 1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
							2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah triwulan I, dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
					B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II		B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					<p>B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III</p>		<p>B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)</p>
					<p>B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV</p>		<p>B12: 1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan IV)</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					2. Terusunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati melalui Wakil Bupati		2. Scan laporan yang ditujukan kepada Bupati melalui Wakil Bupati yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di daerah
Review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di daerah	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di daerah	Tersusunnya laporan hasil review Inspektorat terhadap PPRG di daerah	B03: Penyusunan kegiatan review PPRG dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		B03: Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
					B06: Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah		B06: Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP, antara lain Undangan, Absensi, notulen, dan dokumentasi
					B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2020		B09: 1. Scan Surat Keputusan Inspektur, terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten 2. Hasil review PPRG pada Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					B12: Laporan pelaksanaan Review PPRG untuk Tahun Anggaran 2020		B12: Scan laporan pelaksanaan Review PPRG untuk Tahun Anggaran 2020
Pengawasan terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di daerah	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Tersedianya hasil pengawasan terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah	Tersusunnya laporan hasil pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG di Daerah	B03: 1. Penyusunan instrumen pengawasan implementasi PPRG 2. Pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada Perangkat Daerah Periode Januari – Maret		B03: 1. Scan instrumen pengawasan implementasi PPRG 2. Scan hasil pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada Perangkat Daerah Periode Januari – Maret
					B06: Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode April – Juni		B06: Scan hasil pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode April – Juni
					B09: Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode Juli – September		B09: Scan hasil pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode Juli – September
					B12: 1. Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode Juli – September		B12: 1. Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode Juli – September

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					2. Tersusunnya rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG Kabupaten yang disampaikan kepada Bupati melalui Wakil Bupati dan Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG		2. Scan laporan yang berisi rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat yang disampaikan kepada Bupati melalui Wakil Bupati dan Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada ketua dan sekretaris Pokja PUG

BUPATI DHARMASRAYA,

dto
SUTAN RISKA